

**DAMPAK MUTASI PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KABUPATEN
TABANAN**

**(Studi Kasus Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB P2) di Kabupaten Tabanan)**

Oleh

Ni Made Dwi Febriyanti

Program Studi S1 Akuntansi

ABSTRAK

Mutasi PBB P2 merupakan perubahan objek dan subjek pajak pada SPPT yang disesuaikan dengan sertifikat hak milik dari wajib pajak. Perubahan ini juga mengakibatkan perubahan atas PBB P2 yang dipungut oleh BKD Kabupaten Tabanan. Teori *Stakeholder* menjelaskan pemerintah memperhatikan kepentingan wajib pajak, dilihat dari asas pemungutan PBB P2. Asas pemungutan PBB P2 belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai mutasi PBB P2 yang dilaksanaan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan, dengan melakukan wawancara mendalam dengan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, data sekunder didapatkan dari buku dan referensi lain untuk mendukung penelitian. Metode dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data serta penarikan kesimpulan. Penerapan asas pemungutan PBB P2 di Kabupaten Tabanan telah berjalan dengan baik. Akibat dari mutasi PBB P2 ini, wajib pajak akan mendapatkan rekapan tunggakan dengan nilai yang cukup tinggi. Pemerintah telah berusaha dengan maksimal untuk mengatasi keluhan wajib pajak yang tergambar pada asas ekonomi. Mutasi PBB P2 ini membawa dampak positif bagi wajib pajak, dengan mutasi PBB P2 ini wajib pajak dapat dikenakan PBB P2 yang sesuai dengan sertifikat hak milik sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pengenaan pajak.

Kata Kunci : Mutasi Pajak, PBB P2, Asas-asas Pemungutan Pajak

**IMPACT OF TAX MUTATION FOR TAXPAYER BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) IN TABANAN REGENCY**

**(Study Case Tax Mutation of Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB P2) in Tabanan Regency)**

By

Ni Made Dwi Febriyanti

S1 Accounting Study Program

ABSTRACT

Mutation PBB P2 is change of object and subject of tax on SPPT which is adjusted to the certificate of ownership of the taxpayer. This change also resulted in changes to the PBB P2 collected by the BKD of Tabanan Regency. Stakeholder theory explains that the government pays attention to the interests of taxpayers, seen from the principle of collecting PBB P2. The principle of P2 PBB collection has not gone well. This study aims to determine: To determine the perception of taxpayers regarding the mutation of PBB P2 which is carried out by the government of Tabanan Regency.

This research was conducted in Tabanan Regency, by conducting in-depth interviews with taxpayers. In this study using qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews, observations and documentation, secondary data obtained from books and other references to support research. The analytical methods and techniques used in this research are data collection, data reduction, data presentation, data analysis and drawing conclusions. The implementation of the P2 PBB collection principle in Tabanan Regency has been going well. As a result of this PBB P2 mutation, taxpayers will get a recapitulation of arrears with a high enough value. The government has tried its best to overcome the complaints of taxpayers which are reflected in the economic principle. This PBB P2 mutation has a positive impact on taxpayers, with this PBB P2 mutation, taxpayers can be subject to PBB P2 in accordance with the certificate of ownership so that there is no excess or deficiency in taxation.

Keywords: *Tax Mutation, PBB P2, Tax Collection Principles*